

---

**MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM KIA TERHADAP STUNTING DI UPT PUSKESMAS PORIAHA KABUPATEN TAPANULI TENGAHTAHUN 2023****Oleh****Devi Kristina Hutagalung****STIKes Nauli Husada Sibolga****E-mail: [devikristina30@gmail.com](mailto:devikristina30@gmail.com)**

---

**Article History:**

Received: 22-12-2023

Revised: 30-12-2023

Accepted: 22-01-2024

**Keywords:**

Program KIA,

Stunting

**Abstract:** *Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi di masa lampau dan kondisi kegagalan untuk mencapai perkembangan fisik yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain potong-lintang (Cross Sectional) antara variabel Independen dan Dependen, dimana pengamatan dan pengukuran seluruh variabel di lakukan pada saat yang sama atau sekaligus dalam waktu yang sama, untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang berdukungan bidan terhadap stunting di wilayah kerja Puskesmas Poriaha. Hasil dari berbagai penelitian membuktikan bahwa dukungan tenaga kesehatan sangat penting untuk mencegah kejadian stunting, sehingga diperlukan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dukungan tenaga kesehatan dalam pencegahan stunting hanya 27,4% dan kejadian stunting 41,5% di Puskesmas Poriaha*

---

**PENDAHULUAN**

Program kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan dan keberhasilan program KIA menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI sebagai program prioritas dalam pembangunan kesehatan. (Renstra Tahun 2015-2019)

Saat ini buku KIA yang digunakan adalah versi tahun 2020. Penggunaan Buku KIA ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 284/Menkes/SK/III/2004 tentang buku kesehatan Ibu dan Anak yang menetapkan bahwa buku KIA merupakan satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan ana. Saat kehamilan, persalinan, setelah melahirkan, sampai anak berusia 5 tahun, keluarga berencana, imunisasi bayi, gizi dan pemantauan buku tumbuh kembang anak (Kemenkes, RI.2020)

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Keadaan ini diukur dengan memantau panjang

atau tinggi badan yang lebih minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah balita stunting, bukan hanya menjadi permasalahan gizi, tetapi juga disebabkan karena faktor sosial dan ekonomi keluarga, status gizi ibu hamil, status kesehatan bayi dan asupan gizi bayi yang kurang. Balita yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal pada masa yang akan datang (Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2020)

Tingginya angka kematian ibu dapat menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Penurunan AKI juga merupakan indikator keberhasilan derajat kesehatan suatu wilayah. Untuk itu pemerintah berupaya bahu membahu membuat berbagai strategi untuk akselerasi menurunkan AKI.

Pemanfaatan buku KIA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Lawrence Green (2011), menyebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu yang pertama faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan budaya). Rendahnya pemanfaatan buku KIA masih terkendala oleh rendahnya pengetahuan dan sikap ibu tentang manfaat dari buku KIA dan sebagian ibu juga menganggap hal-hal yang berhubungan dengan buku KIA hanya sekedar buku catatan pemeriksaan (Yayu, dkk, 2015). Kedua yaitu faktor pemungkin (lingkungan fisik, biaya, sarana atau fasilitas kesehatan). Keterjangkauan jarak, ketersediaan transportasi dan ketersediaan fasilitas kesehatan di lingkungan ibu memberikan pengaruh yang besar dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, salah satunya yaitu dalam menggunakan buku KIA (Mulia, 2015). Terakhir yaitu faktor pendorong atau penguat (sikap dan perilaku petugas kesehatan) (Notoatmodjo, 2015). Hasil Penelitian Hasanbasri dan Emoviana (2006) di Kota Sawalunto menunjukkan bahwa 80% petugas kesehatan tidak memberikan penyuluhan kepada ibu sesuai dengan materi yang terdapat dalam buku KIA.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Salah satu upaya tersebut yaitu penggunaan buku KIA untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil sampai anak berusia 5 tahun. Program ini telah diperkenalkan sejak bulan Februari tahun 1993 melalui kerjasama Departemen Kesehatan dengan Japan Internatioanl Cooperation Agency (JICA) (Depkes RI dan JICA, 2015). Setelah melalui berbagai proses pengembangan, pada tahun 2015 buku KIA di revisi dan mengalami beberapa perubahan salah satunya yaitu memperpanjang masa penggunaan hingga anak berusia 6 tahun.

Indonesia berperan mencegah stunting pada tingkat internasional dengan bergabung dalam Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. SUN adalah gerakan global dengan prinsip semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi yang baik. Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan yang bertujuan mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang yaitu "Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan" yang dikenal sebagai 1.000 HPK (Millennium Challenge Account, 2015). Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

Masalah stunting merupakan masalah besar bagi Indonesia, karena pertumbuhan anak stunting tidak hanya terhambat oleh perkembangan fisik tetapi juga perkembangan

otak. Anak yang mengalami stunting dapat mengalami gangguan perkembangan fisik, mental, kognitif dan intelektual sehingga anak tidak mampu belajar secara optimal. Anak stunting mempunyai kemampuan kognitif yang rendah, jika tidak ditangani sebelum mencapai usia lima tahun dapat berdampak sampai usia dewasa dan berisiko mengalami kematian, serta wanita dewasa yang stunting berisiko melahirkan anak dengan BBLR (Sulistianingsih & Yanti, 2018).

Faktor yang berhubungan dengan terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi saat ibu mengandung, bayi tidak diberikan ASI Eksklusif pada enam bulan pertama dan MP-ASI, status sosio-ekonomi yang rendah dalam keluarga, dan tingkat pendidikan ibu (Ni'mah & Nadhiroh, 2015).

Stunting tidak hanya disebabkan karena faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor multi dimensi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting diantaranya praktek pengasuhan yang kurang baik, masih terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas, dan masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017)

Pencegahan stunting dapat dilakukan mulai dari hamil sampai dengan setelah melahirkan serta memberikan ASI Eksklusif. Selanjutnya, hal yang juga sangat penting yaitu pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) bagi bayi yang berusia 6 bulan keatas dan anak. MPASI diberikan saat bayi berusia 6-24 bulan karena kandungan nutrisi ASI sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan zat gizi pada anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Masa transisi ini merupakan waktu yang kritis karena kemungkinan anak yang mengalami gizi kurang berada pada fase ini. Setelah pemberian MPASI, selanjutnya pemantauan pertumbuhan anak. Identifikasi ukuran berat dan tinggi anak dari sejak lahir sampai usia 5 tahun. Perkembangan berat dan tinggi badan anak bisa dilakukan setiap bulan di Posyandu atau fasilitas kesehatan lain dan hasilnya dicatat di Kartu Menuju Sehat (KMS) yang tersedia dia dalam buku KIA. (Kemenkes, RI.2020)

Nias barat terdiri dari delapan kecamatan dengan luas wilayah 520.34 Km<sup>2</sup> Lolofitu Moi merupakan kecamatan terbesar ke 5 dengan luas wilayah 53,84 Km<sup>2</sup> dengan pertumbuhan laju penduduk paling rendah yaitu sebesar 0,003%. Mayoritas masyarakat Nias barat bekerja dibidang pertanian dan mayoritas masyarakat pendidikan SD. Rendahnya pendidikan dan penghasilan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan terlebih dalam memperhatikan KIA. Oleh sebab itu petugas kesehatan berusaha untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Poriaha untuk memperhatikan KIA untuk mencegah terjadinya stunting mulai dari kandungan dengan memperhatikan catatan buku KIA.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian "Manajemen Pengelolaan Program KIA Terhadap Stunting di UPT Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023"

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan pada program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang diamati dari suatu individu,, kelompok, masyarakat dan atau organisasitertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. (Bogdan dan Taylor (2012: 21-22)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **UPT Puskesmas Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah**

UPT Puskesmas Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Puskesmas rawat inap dengan pelayanan 24 jam. Puskesmas ini memiliki 6 jenis pelayanan UPT di luar gedung seperti pelayanan kesehatan di 3 Poskesdes, pelayanan kesehatan di 16 Posyandu Balita, pelayanan kesehatan di 16 posyandu Lansia, Puskesmas keliling di 4 desa, pelayanan kesehatan di 15 sekolah, pelayanan kesehatan di 16 Posbindu PTM.

#### **Hasil Penelitian**

##### **Data Demografi Responden**

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, dimana 1 informan kunci dan 4 lainnya informan biasa.

##### **Pendidikan**

Berdasarkan data yang ada di Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah, tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, mulai dari Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

##### **Sosial Budaya**

Dalam upaya membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diperhatikan berbagai faktor sosial budaya masyarakat. Berdasarkan data yang ada di UPT Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah, ada beberapa kelompok yang menjadi komponen sosial budaya antara lain Dukun beranak, tukang pijat, PKK dan lain-lain.

#### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Poriaha Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara dan observasi yang dibuat dalam bentuk matriks mengingat angka kejadian stunting di Lolofitu Moi sebanyak 78 kasus pada balita.

#### 1. Karakteristik Informan

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Informan**

No	Nama Informan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	TH	45	Perempuan	S1 Kesmas
2	DG	35	Perempuan	D3 Kebidanan
3	LG	33	Perempuan	D3 Kebidanan
4	NZ	27	Perempuan	D3 Keperawatan
5	NL	27	Perempuan	D3 Gizi

Berdasarkan Tabel 4.1 informan berjumlah 5 orang yang terdiri dari 5 orang perempuan. Pendidikan terakhir informan berbeda-beda yang mulai dari D3, S1 informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan teknik *purosive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti di mana informan terlibat di dalam program KIA di UPT Puskesmas Poriaha.

## 2. Perencanaan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha

Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan atau siklus tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2015).

### **Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah, dan Merumuskan Program Kerja KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dari hasil keterangan informan tentang cara mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah dan merumuskan program kerja, dapat di simpulkan bahwa cara informan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah dan merumuskan program kerja di lakukan dengan melihat target program yang belum tercapai sebelumnya. Setelah itu survey mawas diri dilakukan untuk melihat masalah apa yang terdapat di wilayah kerjanya, serta melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mendata jumlah kasus yang terjadi di wilayah kerjanya.

Adapun cara untuk menentukan prioritas masalah, dengan melihat tingkat urgensi suatu masalah yang di rumuskan secara bersama-sama dan tahap terakhir yaitu penyusunan POA (Plan Of Action).

## 3. Pengorganisasian Program KIA Terhadap Stunting di UPT Puskesmas Poriaha

Pengorganisasian di Puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana Puskesmas. Struktur organisasi Puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, serta pola interaksi yang akan diikuti tenaga pelaksana di UPT Puskesmas Poriaha (Endang,S, 2011).

### **Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya dan Menyusun Kelompok Kerja**

---

**pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dari hasil keterangan informan tentang cara pembagian tugas, penentuan sumber daya dan menyusun kelompok kerja, dapat di simpulkan bahwa pembagian tugas, penentuan sumber daya dan menyusun kelompok kerja, di tentukan berdasarkan disiplin ilmu atau kompetensi masing-masing tenaga kesehatan. Dimana proses pembagian tugas, sumber daya, dan menyusun kelompok kerja ini di rumuskan secara bersama-sama di setiap awal tahun, berdasarkan persetujuan dari masing-masing tenaga kesehatan yang kemudian di putuskan oleh Kepala Puskesmas.

**4. Pergerakan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha**

Pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi. pergerakan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Nawawi, 2010).

**Keterlibatan Pimpinan dalam Pergerakan dan motivasi atau bimbingan yang diberikan pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dari hasil keterangan informan mengenai keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan motivasi atau bimbingan seperti apa yang di berikan, dapat di simpulkan bahwa di dalam proses pergerakan atau pelaksanaan program, pimpinan selalu memberikan motivasi dan bimbingan. Seperti memberikan solusi apabila terjadi hambatan atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, pada saat program tersebut dilaksanakan.

**5. Pengawasan Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha**

Pengawasan di definisikan oleh Azwar (2008) adalah melakukan penilaian sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan pegawai untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan atau suatu proses untuk mengukur pelaksana suatu program kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai. Pengawasan bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil pekerjaan, menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil tindakan-tindakan kritik terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012).

**Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dari hasil keterangan informan tentang cara pimpinan dalam melakukan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam melakukan pengawasan program KIA biasanya melalui perantara Bikor (Bidan Koordinator) atau Via Telepon, karena pimpinan memberikan kepercayaan kepada semua petugas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas masing-masing yang di berikan.

**6. Evaluasi Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha**

Evaluasi juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azwar, 2006).

Melalui evaluasi dari setiap pelaksanaan kerja, organisasi dapat mencapai beberapa tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya yang kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2014).

### **Cara Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan Korektif Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dari hasil keterangan informan tentang cara penilaian keberhasilan program dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang telah di capai serta memperbaiki jika terdapat penyimpangan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada setelah program dilaksanakan. Selain itu, adanya penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana program tersebut tercapai.

### **Pembahasan**

Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan di atas adalah satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan (Depkes RI, 2006).

Fungsi manajemen diadaptasi dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry dengan penambahan fungsi evaluatif (Penilaian), sehingga fungsi-fungsi manajemen Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan), adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya;
2. Organizing (Pengorganisasian), adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan;
3. Actuating (Penggerakan atau Pelaksanaan), fungsi penggerakan atau pelaksanaan adalah proses pembimbingan kepada staf agar mereka mampu dan mau bekerja secara optimal. Kepemimpinan efektif, yang memberikan motivasi, komunikasi, dan pengarahan akan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi aktuasi;
4. Controlling (Pengawasan atau Pembimbingan), proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang sudah disusun dan mengadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pelaksanaan fungsi manajemen ini memerlukan perumusan standar kinerja (standard performance);
5. Evaluating (Penilaian) adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan saran-saran yang dapat dilakukan pada

setiap tahap dari pelaksanaan program.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi manajemen pada Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha sudah berjalan sesuai dengan kelima fungsi manajemen tersebut meskipun terpisah satu sama lain, tetapi sebagai suatu kesatuan proses, dimana kelimanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain. Kelima fungsi ini sifatnya saling terintegrasi, dimana aktivitas manajerial dimulai dengan planning dan berakhir pada evaluasi.

Oleh karena itu, jika perencanaan (planning) telah disusun, kemudian struktur organisasi dirancang sedemikian rupa agar setiap tugas dan hubungan antar unit kerja dalam organisasi dapat merealisasikan rencana (organizing), maka pimpinan memilih dan menetapkan personalia yang tepat untuk menempati posisi dalam struktur organisasi dan mengerjakan berbagai tugas. Kemudian individu atau tim yang bekerja dalam organisasi dibimbing dan diarahkan agar mereka bertindak atau bekerja efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (actuating), akhirnya semua aktivitas atau operasi organisasi dikontrol untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan (controlling), kemudian hasil yang dicapai dibandingkan dengan tolak ukur atau kriteria kinerja yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan program (evaluating).

### **Perencanaan**

Fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja Puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan program Puskesmas dalam mencapai tujuan Puskesmas (Satrianegara, 2014).

Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2010).

#### **1. Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah dan Merumuskan Program Kerja pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan analisis kebutuhan (need assessment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Analisis kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan atau dikerjakan (Azwar, 2010).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas Lolofitu Moi bahwa proses perencanaan dimulai dengan melihat target program yang belum tercapai sebelumnya. Kemudian melakukan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) setelah itu Survey Mawas Diri (SMD) untuk melihat masalah apa yang terdapat di wilayah kerjanya. Adapun cara dalam menentukan prioritas masalah, yaitu dengan melihat tingkat urgensi suatu masalah dari hasil MMD selanjutnya di kroscek dengan melakukan SMD kemudian masalah tersebut di rumuskan secara bersama-sama, selanjutnya penyusunan POA (Plan Of Action) sebagai tindak lanjut dari masalah tersebut. Dimana POA merupakan sekumpulan

---

aktivitas kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target program KIA di Puskesmas.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai fungsi manajemen perencanaan pada program KIA di UPT Puskesmas Poriaha bahwa proses perencanaan di mulai dari mengidentifikasi masalah, dimana proses identifikasi masalah itu dilakukan dengan melakukan Musyawarah Masyarakat Desa dan Survey Mawas Diri untuk melihat suatu masalah yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. Menentukan prioritas masalah dilakukan dengan melihat masalah yang paling urgent atau harus segera di tangani, atau program kerja yang telah berjalan tetapi persentase keberhasilannya rendah/tidak mencapai target serta melihat suatu kasus yang menjadi kejadian luar biasa yang perlu segera di atasi di wilayah kerja Puskesmas. Setelah itu, penyusunan program kerja yang dirumuskan secara bersama-sama serta menyerahkan hasil penyusunan rencana kegiatan tersebut kepada kepala Puskesmas dalam bentuk POA (Plan Of action), kemudian disesuaikan berdasarkan dana yang ada, yang berasal dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).

Identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan merumuskan program kerja itu di lakukan pada proses perencanaan dengan melakukan survey mawas diri (SMD) untuk melihat keadaan atau masalah yang terjadi serta potensi apa yang dimiliki untuk mengatasi masalah yang ada, kemudian menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan yang di rumuskan bersama-sama kemudian menyusun program kerja yang di sajikan dalam bentuk Plan Of action (POA)

Dari hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan dengan informan tentang rencana anggaran program di Puskesmas, bahwa dana bersumber dari BOK atau bantuan operasional kesehatan. Bantuan dana operasional kesehatan di khususkan sebagai dukungan dana operasional program bagi Puskesmas serta untuk bantuan penyelenggaraan manajemen di Puskesmas..

Tujuan khusus dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yaitu, menyediakan dukungan dana operasional program bagi puskesmas untuk pencapaian program kesehatan, menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan, mengaktifkan penyelenggaraan manajemen puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan atau pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi (Kemenkes, 2015).

Fungsi perencanaan adalah kegiatan yang akan di laksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan, tanpa adanya fungsi perencanaan maka tidak ada kejelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Melalui fungsi perencanaan akan ditetapkan tugas-tugas pokok dan dengan tugas-tugas ini pimpinan akan mempunyai pedoman dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muninjaya (2014), bahwa fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Fungsi perencanaan merupakan landasan dasar dari manajemen secara keseluruhan, tanpa ada fungsi perencanaan tidak mungkin fungsi manajemen yang lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam setiap kegiatan, terlebih lagi kegiatan-kegiatan yang besar dan bersifat kompleks. Suatu kegiatan yang tidak didahului dengan perencanaan, kemungkinan besar tidak dapat mencapai tujuan

### **Pengorganisasian**

Fungsi pengorganisasian di tingkat Puskesmas didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian otoritas atau wewenang untuk mencapai tujuan Puskesmas secara efektif dan efisien (Satrianegara, 2014).

Konsep teori yang di kembangkan oleh Terry (2016), menunjukkan bahwa setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya maka perlu merancang atau mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

### **2. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya, dan Menyusun Kelompok Kerja Pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Pembagian tugas adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi, dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbaas, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatankegiatan yang lebih kecil.

Dari hasil wawancara yang telah di lakukan pada Program KIA di Puskesmas Lolofitu Moi bahwa proses pengorganisasian, di tentukan berdasarkan kompetensi atau disiplin ilmu masing-masing yang di miliki tenaga kesehatan yang dimana Bikor mempunyai peranan penting dalam hal penentuan tim kerja pelayanan KIA. Setelah itu, di rumuskan bersama-sama berdasarkan persetujuan masing-masing tenaga kesehatan dan keputusan kepala Puskesmas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di UPT Puskesmas Poriaha, bahwa proses pengorganisasian pada program KIA secara umum sama dengan pengorganisasian pada program lainnya di Puskesmas, yang di tentukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing tenaga kesehatan hanya saja Bidan Koordinator berperan aktif dalam melihat potensi anggotanya. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang program, dimana pembagian sumber daya dirumuskan bersamasama serta berdasarkan keputusan dari kepala Puskesmas. Adanya surat keputusan kepala Puskesmas tentang pembagian tugas pegawai, menjadi suatu pedoman untuk pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.

Setelah rencana kegiatan puskesmas disusun, perlu dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggung jawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian tugas seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral (Kemenkes, 2014).

Terdapat dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan dalam proses pengorganisasian yaitu; Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan; penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung yakni antar

sektor-sektor terkait maupun secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan (Kemenkes, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan informan mengenai cara penyusunan kelompok kerja serta penentuan sumber daya, yaitu dilakukan pada rapat perencanaan tingkat puskesmas yang dihadiri oleh seluruh petugas kesehatan yang terlibat kemudian di rumuskan secara bersama-sama. Pengorganisasian tim program kerja dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing bidan, dan tidak ada rangkap jabatan dalam hal ini masing-masing bidan melakukan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

#### **Pergerakan atau Pelaksanaan**

Koontz dan Donnel (2001) mengatakan pergerakan adalah pengarahan atau directing dari pimpinan atau leading. Sedangkan Siagian (2000), menyatakan pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara dan teknik untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan ekonomis

### **3. Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan Program, Motivasi dan Bimbingan seperti apa yang di berikan pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Keterlibatan pimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin ini harus ada dalam fungsi pergerakan, karena secara sederhana fungsi pergerakan ini bertujuan untuk membuat para karyawan melakukan apa yang di inginkan dan apa yang mereka harus lakukan. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah di tetapkan lebih dahulu (Satrianegara, 2014).

Inti dari fungsi pergerakan adalah kepemimpinan dengan harapan para anggota organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin. Kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, komunikasi dan pengarahan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi pergerakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada program KIA di Puskesmas Kampili bahwa di dalam proses pergerakan, pimpinan selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam proses pelaksanaan program dan memberikan solusi kepada petugas kesehatan apabila terjadi hambatan pada saat program di laksanakan. Pergerakan yang dilakukan oleh tim kerja juga cukup efektif. Dimana adanya kerjasama antara lintas sektor yang dimanfaatkan sebagai sumber daya puskesmas untuk memperoleh informasi atau mendukung tercapainya program yang sedang dijalankan. Para bidan juga diarahkan untuk mengadakan home care yakni kegiatan turun langsung kelapangan atau rumah warga untuk melakukan pelayanan KIA.

petugas kesehatan mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan masing-masing. Adapun keterlibatan pimpinan selalu memberikan bimbingan dan motivasi jika terjadi hambatan pada saat proses pelaksanaan program, sehingga hambatan atau masalah yang di temukan pada saat proses pelaksanaan program, dapat segera di segera teratasi. Oleh karena itu, pimpinan memiliki tugas melakukan koordinasi, motivasi dan mengarahkan seluruh komponen manajemen. Hal ini bertujuan agar semua komponen dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, demi mencapai apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari perencanaan Puskesmas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ridwan (2010), terdapat tiga komponen yang saling berhubungan yaitu komponen koordinasi, pengarahan dan pimpinan, pada ketiga komponen tersebut, yang memegang peran penting yakni pimpinan (kepemimpinan). Dalam konteks manajemen kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mampu dan mau mengikuti keinginan pemimpin demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efektif dan efisien.

#### **Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan untuk menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2003).

#### **4. Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan Pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Dalam hal pengawasan pimpinan perlu mengawasi aktivitas karyawan, serta menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan koreksi jika diperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas Kampili, informan menyatakan bahwa proses pengawasan di lakukan oleh Kapus yakni melakukan pengawasan setiap minggunya untuk mengontrol dan memonitoring perkembangan program yang sedang berjalan serta melalui perantara Bikor (Bidan Koordinasi) yang dipercaya oleh Kepala Puskesmas kemudian dilaporkan kepada kepala puskesmas setiap triwulan yakni pada saat diadakan rapat evaluasi. Sehingga dapat dinilai bahwa, pada proses pengawasan program di Puskesmas Lolofitu Moi berjalan cukup efektif.

Untuk mempercepat penurunan stunting Puskesmas dan Posyandu memantau Pertumbuhan Balita diataranya melalu perkembangan dan pengukuran serta pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), pemberian kapsul Vitamin A, Praktek Pemberian makan bayi dan anak (PMBA), pendidikan gizi Ibu Balita, minum tablet tambah darah bersama untuk mengatasi Anemia pada remaja Putri serta penyuluhan kepada pada kelas Ibu Hamil.

Robbin (2009), menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas yang

mendasar, sehingga membutuhkan seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Sejalan dengan pendapat siagian (2000), bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengendalikan, agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

### **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah disusun dan direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan, dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya, kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2004)

### **5. Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan Korektif pada Program KIA terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha**

Proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur, kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan saransaran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di UPT Puskesmas Poriaha bahwa fungsi evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana program yang telah tercapai, serta memperbaiki apabila terjadi penyimpangan yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti bahwa fungsi evaluasi di Puskesmas Kampili pada Program KIA tersebut dilaksanakan, dengan melihat pencapaian indikator keberhasilan Program KIA atau dengan melihat pencapaian POA (Plan Of Action) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan dan hambatan atau penyimpangan-penyimpangan seperti apa yang terjadi. Kemudian di jadikan sebagai bahan perbaikan ke masa yang akan datang, serta melakukan tindakan korektif jika situasi dan kondisi mendukung. (Form Standar Pelayanan

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Gambaran Manajemen Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terhadap stunting di UPT Puskesmas Poriaha, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan pada program KIA terhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan program KIA.

2. Fungsi pengorganisasian pada program KIA terhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha telah dilaksanakan sesuai prosedur yakni pembagian tugas dilakukan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing pegawai.
3. Kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada tenaga kesehatan dalam fungsi pergerakan pada program KIA terhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha telah dilaksanakan.
4. Bentuk pengawasan pada program KIA terhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha dilaksanakan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan diawasi langsung dilapangan oleh Bidan Koordinator.

Fungsi evaluasi pada program KIA di Puskesmas terhadap pengelolaan stunting di UPT Puskesmas Poriaha telah dilaksanakan, dengan adanya standar pelayanan minimal yang telah disusun untuk melihat sejauh mana target yang telah tercapai

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adriani, M, & Wirjatmadi, B., (2012). Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [2] Effendi, R.W., & Tjahjono, E., (2000). Hubungan Antara Perilaku Coping dan Dukungan Sosial dengan Kecemasan Pada Ibu Hamil Anak Pertama. *Jurnal Anima*, 14, hal 214-227
- [3] Ginting, P. Y. (2020). Program Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Tahun 2018. [Skripsi, Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24957>.
- [4] Karolina, E.N., Ernawati, A., dan Evawany, Y., (2013). Hubungan Perilaku Kadarzi dengan Status Gizi Balita Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Blangkejeran Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012. *Jurnal Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi* Vol. 2 No. 2 (2013) Hal.1-10.
- [5] Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta: Buletin Jendela Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, ISSN 2088 - 270 X Semester I, 2018.
- [6] Lemeshow, S., Hosmer Jr, D.W., Klar, J., Lwanga, S.K., (1990). Adequacy of Sample Size in Health Studies, John Wiley & Sons, New York.
- [7] Lestari, S. (2020). Determinan Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sepulu. [Skripsi, STIKes Ngudia Husada Madura]. <http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/515/>
- [8] Loya RRP, Nuryanto N. (2017). Pola asuh pemberian makan pada bayi stunting usia 6-12 bulan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Journal of Nutrition College*;6(1):84-95.
- [9] Melo L.P.D. (2013). Sunrise Model : A Contribution to the Teaching of Nursing Consultation in Collective Healt. *American Journal of Nursing Research*. 2013;1:20-3.
- [10] Munawaroh. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*. Vol. 20 No. 2, hal:231-242.
- [11] Notoatmodjo, S., (2007). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

- [12] Perry & Potter. (2010). Fundamental of Nursing. 6th ed. Elisavier: St. Lous
- [13] Purba, R. O. (2018). Analisis Implementasi Program Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Langkat Tahun 2018. [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29349>.
- [14] Sewa, R. (2019). Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan sikap

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN